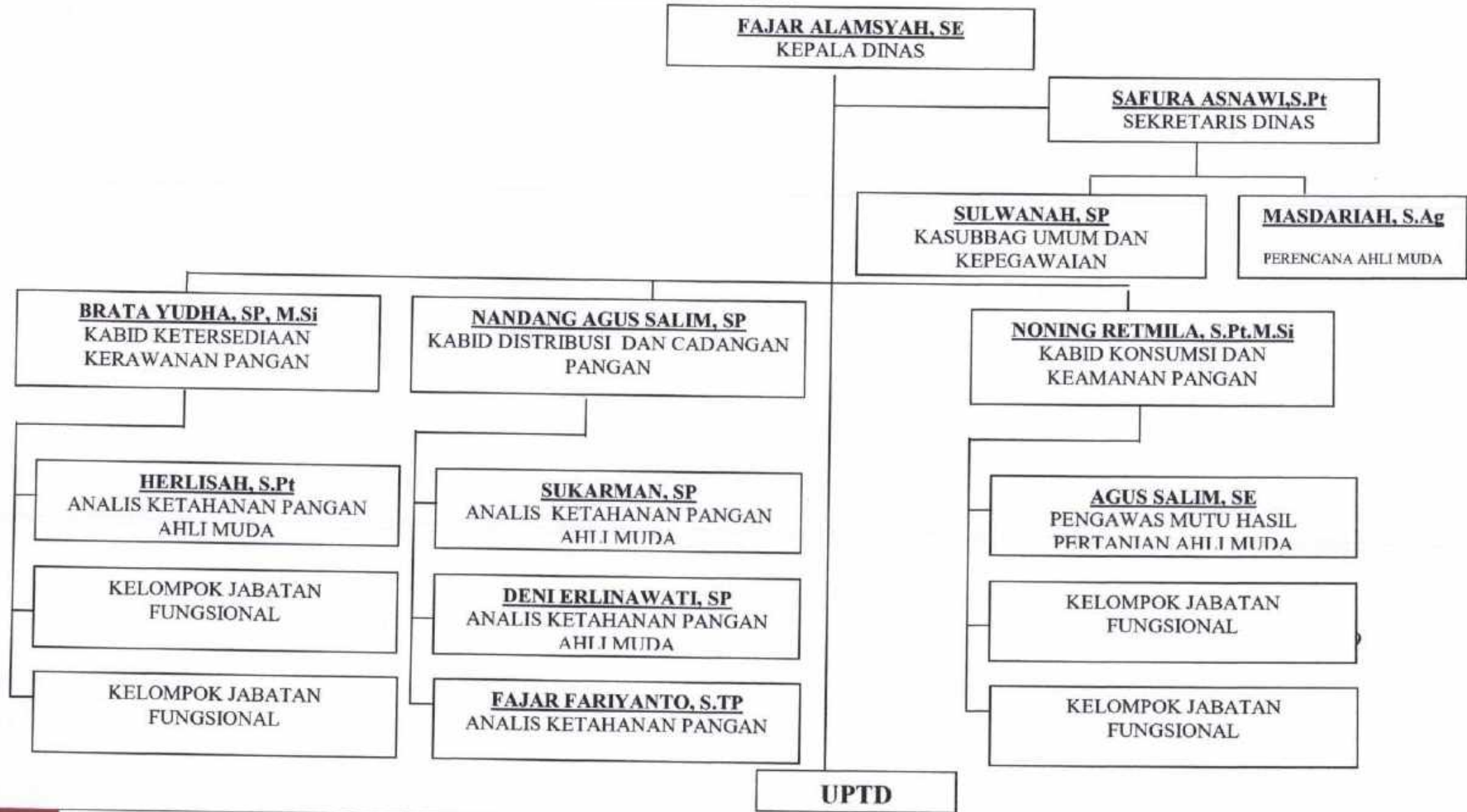


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PER 31 DESEMBER 2023**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, isu strategis, kebijakan, strategi, dan program kegiatan pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan; dan indikator-indikator kinerja Dinas, berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dan mungkin terjadi serta melakukan antisipasi terhadap perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rumusan pokok-pokok Rencana Strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat** dan misi Pertama Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera yang bertumpu pada sector pertanian dan Perikanan maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut pada sektor Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jbaung Timur merumuskan Visinya sebagai berikut : “ **Memantapkan Ketahanan Pangan Kabupaten Yang Berbasis Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan melalui Pemberdayaan Masyarakat Secara Proaktif dan Aspiratif**”. Dalam menentukan visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentunya juga harus berlandaskan filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan, antara lain :

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. Terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem dari unsur-unsur yang merupakan Sub Sistem yang saling berintegrasi, yaitu Sub Sistem Ketersediaan, Sub Sistem Distribusi dan Sub Sistem Konsumsi.

Adapun penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Mampu Memberdayakan**, adalah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau lembaga/organisasi mempunyai kemampuan dan resistensi yang memadai untuk menghimbau, membina dan motivasi masyarakat menuju kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.
2. **Masyarakat**, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama di suatu lingkungan.
3. **Proaktif**, adalah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau lembaga/organisasi mempunyai ambisi yang kuat dalam rangka pembinaan masyarakat menuju penekanan/ pengurangan angka kemiskinan yang didukung oleh kelembagaan yang kokoh, SDM yang handal, penguasaan teknologi dan informasi, manajemen yang profesional, finansial yang kuat, serta memiliki legalitas.
4. **Aspiratif**, adalah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang atau lembaga/organisasi mempunyai keinginan untuk mencari kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada teknologi atau science yang berkembang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Melalui diversifikasi pangan dan gizi serta penanganan rawan pangan.
2. Meningkatkan Kemampuan kelembagaan Distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.
3. Meningkatkan Pengawasan mutu dan keamanan pangan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan sumber daya aparatur yang profesional.

2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

➤ Tujuan

Merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan yang dituangkan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000. serta Dasar Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Tujuan ini ditetapkan harus mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Selanjutnya secara prinsipil tujuan tersebut akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021-2026 adalah " Meningkatkan Ketahanan Pangan ".

➤ Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan, konsumsi pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat ;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

➤ STRATEGI

Pada dasarnya dalam suatu lingkungan organisasi terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang selalu dimiliki dan dihadapi Dinas Ketahanan Pangan.

1. Identifikasi lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan
 - a. Kekuatan (strengths) Kekuatan adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan sehingga mampu melakukan semua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tugas dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu berupa potensi yang dapat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan disini adalah sebagai berikut :
 - Adanya dukungan produk perundang-undangan
 - Adanya program kerja, kegiatan dan dana
 - Adanya dukungan program dan kebijakan dari pemerintah pusat
 - b. Kelemahan (weaknesses) Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :
 - Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
 - Sarana dan prasarana belum memadai
 - Kurangnya data dan informasi yang aktual dan valid
2. Identifikasi Lingkungan Eksternal Dinas Ketahanan Pangan Lingkungan eksternal yang dimaksud disini adalah yang menyangkut aspek-aspek administrative, birokratis, sosial, yang dapat berpengaruh terhadap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam

penyelenggaraan tupoksi di bidang perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan tugas di luar tugas dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.

a. Peluang (Opportunities) Peluang yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Tersedianya potensi sumber daya alam
- Peluang pasar yang masih besar
- Peran aktif masyarakat

b. Ancaman / Tantangan (Threats) Upaya dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai misi akan menghadapi ancaman/ tantangan dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan upaya diverifikasi pangan dan keamanan pangan
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA
- Masih lemahnya kelembagaan kelompok tani.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemantauan ketersediaan pangan, distribusi dan stabilitas harga, pembinaan Mutu dan keamanan Pangan serta koordinasi lintas sekto ketahanan pangan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

➤ KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/ memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjungsabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan, diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan ;
2. Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah;
3. Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan ;
4. Penyediaan Stok cadangan pangan;
5. Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan;
6. Peningkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	1 Meningkatkan pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat program Penanganan Daerah RawanPangan
				Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	

3	Meningkatkan Sarana prasarana infrastruktur Lumbung Pangan dan sarana pendukungnya serta penguatan cadangan pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
		Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
4	Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan/olahan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Program Pengawasan dan Keamanan pangan

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis

2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---

2.1.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

1. Struktur Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 mengacu pada Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021- 2026. Penetapan Kinerja Tahun 2023 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1. Struktur Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.135	1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1. Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten /Kota	1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2. Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian Pangan	263.837.560,- 14.885.022,-
		Skor PPH	92	2. Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Penyediaan Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Pangan. 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi pangan pokok dan pangan lainnya. 3. Pemantauan stok Pasokan dan Harga Pangan 4. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	104.664.400,- 7.783.500,- 105.529.992,- 51.041.820,-

					2. Pengelolaan dan keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1. Kooordinasi dan sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota . 2. Pengadaan cadangan pangan 3. Pemeliharaan Cadangan Pangan	53.300.100,- 121.022.000,- 3.145.000,-
					3. Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	1. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan Perkapita per Tahun 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local . 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun	23.504.473,- 90.690.028,- 50.495.000,-
				Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Penyusunan Peta kerentanan dan Ketahanan pangan Kecamatan	1. Penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan Pangan	52.966.966,-
					2. Penaganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan Kabupate/kota	34.574.722,-
				Pengawasan Keamanan Pangan	1. Pelaksanaan Pengawasan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	1. Rekomendasi Kemanan pangan segar Asal Tumbuhan Derah Kabupaten/kota	51.363.398,-
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	5. Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.130.000,-
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	BB			1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,-
		Laporan Keuangan sesuai SAP	Sesuai			2. Koordinasi dan Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	1.639.000,-
						3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.150.000,-
						4. Koordinasi dan	1.450.000,-

	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.188.300,-
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000,-
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.267.363,-
	2. Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	567.770.000,-
2. Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.400.000,-
	2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	20.000.000,-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.600.700,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	149.007.214,-
	3. Penyediaan barang Cetak dan penggandaan	10.011.900,-
	4. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	5.000.000,-
	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	2.400.000,-
	6. Penyelenggaraan Rapat	45.000.000,-
	7. Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik	332.400.000,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.560.000,-

					2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	33.150.000,-
					3. Pemeliharaan /Rehabilitas gedung Kantor dan bangunan lainnya	110.000.000,-
JUMLAH						4.822.928.558

2. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	Kkl/Kapita/Tahun	2.135
		Skor PPH	Nilai	92
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	86
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Nilai	BB
		Laporan Keuangan sesuai SAP	Nilai	Sesuai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3.794.124.577,-	APBD
2	Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	278.722.582,-	APBD
3	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	611.176.313,-	APBD
4	Penanganan Kerawanan Pangan	87.541.688,-	APBD
5	Pengawasan Keamanan Pangan	51.363.398,-	APBD
	Jumlah	4.822.928.558,-	

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, terjadi pergeseran-pergeseran yang menyebabkan adanya perubahan pagu anggaran. Namun demikian, perubahan tersebut tidak merubah Perjanjian Kinerja. Pergeseran yang terjadi adalah adanya revisi anggaran Dinas Ketahanan Pangan pada akhir tahun 2023. Alokasi anggaran sebelum Perubahan sebesar Rp. 4.749.353.834 ,- dan setelah Perubahan menjadi Rp. 4.822.928.558,- atau ada penambahan anggaran sebesar Rp.73.574.724,- Selanjutnya guna mendukung pencapaian target sebagaimana

dimaksud maka didukung dengan program antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan
- c. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Program Kerawanan Pangan
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBD II, tetapi perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain seperti APBD Provinsi dan APBN. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut :